

DAFTAR REFERENSI

- Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE UGM, 2001.
- Brotodihardjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Eresco, 1989.
- Chottob, Iskandar & Imam Suhardjo, *Dari Sentralisasi ke Otonomi : DKI Jakarta, Implementasi UU No.34 Th. 1999*. Jakarta : Penerbit DPRB DKI Jakarta, 2000.
- Davey, K.J. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta : UI Press, 1988
- Devas, Nick. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Penerbit UI, 1989.
- Halim, Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2001.
- Ismail, Tjip. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Jakarta : Yellow Printing, 2007.
- Jones, Rowan & Maurice Pendlebury. *Public Sector Accounting*. London : Pitman, 1988.
- Kaho, Josef R. *Prospek Otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta : PT Grafindo Persada, 1997.
- Koswara, E. *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*. Jakarta : Yayasan PARIBA, 2005.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi, 2002.
- _____. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi, 2002.
- Mardiasmo, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm.
- Mamesah, D.J. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah.*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Musgrave, R.A & Peggy B Musgrave. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 1993
- Mustaqiem. *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Kuncoro, Haryo. *Fenomena Flypaper Effect pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X Makasar, 2007
- Prakoso, Kesit B. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press, 2003.

- Rasyid, Ryaas. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan bekerjasama dengan Pustaka Pelajar Offset, 2002.
- Riduansyah, M. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah daerah Kota Bogor)*. Jakarta : Pusat Pengembangan dan Penelitian FISIP UI, 2001.
- Sidik, Machfud. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Orasi Ilmiah, STIA LAN Bandung, 2002.
- Sumitro, Rohmat. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. 1979
- Wajong, J. *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta : Ichtiar, 1962.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
- _____. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Daerah
- _____. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
- _____. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir

- _____. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- _____. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- _____. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- _____. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan
- _____. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Hotel
- _____. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran
- _____. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan
- _____. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- _____. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame
- _____. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah
- _____. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah
- _____. Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta